Bali Post

Pendapatan Dewan Melambung, Rakyat Tersakiti

Kabar menggembirakan diterima para wakil rakyat di negeri ini. Dua tahun sisa masa jabatan DPRD bakal dilalui dengan gelimang pundi-pundi rupiah. Ini menyusul rencana kenaikan penghasilan anggota dewan. Pendapatan anggota dewan dipastikan melambung, sementara rakyat tersakiti.

SEJUMLAH wakil rakyat di kota berwawasan budaya ini juga mengakui telah mendapat dampak terhadap keluarnya PP tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Kami di daerah tentu juga menerima kenaikan tunjangan sebagai anggota dewan, sebagai imbas dari keluarnya PP 18 tersebut," ujar salah seorang anggota DPRD Denpasar, I Wayan Warka, S.H., Jumat (11/8) lalu.

Hanya, seberapa besaran kenaikan tunjangan yang mereka terima, politisi PDI-P asal Kesiman Kertalangu ini, enggan menyebutkannya. Terlebih, di daerah keputusannya baru disahkan dalam sidang paripurna belum lama ini. "Kita kan belum menerima kenaikannya itu, mungkin nanti setelah selesai verifikasi," jelasnya.

Dari pembicaraan antar-anggota dewan, pendapatan tunjangan anggota dewan tahun lalu yang hanya Rp 8-10 juta kini naik menjadi Rp 35-40 juta. Itu baru tunjangan saja, belum gajinya sekitar Rp 8-10 juta. Hanya, anggota dewan yang mengambil tunjangan transportasi harus mengembalikan mobil dinas.

Hal senada juga diungkapkan anggota dewan lainnya, I Nyoman Darsa. Politisi asal Panjer ini mengakui pihaknya akan mendapatkan perolehan dana tunjangan yang cukup signifikan mengalami kenaikan.

Hal. 19
Tunjangan Transportasi

Edisi : Minggu, 13 Agustus 2017

Hal : 1

Bali Post

Tunjangan Transportasi

Dari Hal. 1

Misalnya saja, tunjangan transportasi. "Kalau dilihat dari jenis tunjangannya, tidak ada yang baru. Hanya terjadi peningkatan nominalnya saja," ujarnya.

Pendapat lainnya datang dari Ketua Fraksi Hanura DPRD Denpasar, I.B. Ketut Kiana. Politisi asal Sanur ini bahkan menyambut baik bila mobil dinas yang selama ini diberikan akan ditarik kembali. Mengingat, sudah ada dana tunjangan transportasi. Baginya, tidak masalah bila pemerintah menarik mobil dinas yang selama ini digunakan. "Kami akan diberikan dana tunjangan transportasi, kan bisa digunakan untuk mencicil beli mobil. Dalam setahun kan bisa lunas, setelah itu mobil menjadi milik sendiri," katanya.

Seperti diketahui, naiknya tunjangan itu termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP 18/2017 resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.

Rakyat Tersakiti

Untuk anggota DPRD Bali kenaikan pendapatannya tak tanggung-tanggung. Penghasilan DPRD Bali dari uang representatif (gaji pokok), tunjangan komunikasi intensif dan reses dirancang naik hingga tujuh kali lipat.

Rencana kenaikan gaji ini akan terealisasi jika PP No.18 tahun 2017 dituangkan dalam Perda dan Permendagri tentang klasifikasi atau penggolongan kemampuan keuangan daerah. Permendagri tersebut juga harus dijabarkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

Kendati demikian, rencana kenaikan gaji DPRD tersebut menuai kritik dari masyarakat dan beberapa tokoh akademisi. Salah satunya adalah Akademisi hukum, Dr. I.B. Radendra Suastama, S.H., M.H. Radendra menilai rencana kenaikan gaji DPRD tersebut sungguh sangat disayangkan. Sebab, gaji dan tunjangan DPRD saat ini sudah relatif besar jumlahnya.

"Kalaupun ingin menaikkan gaji dan tunjangan, naikkanlah dahulu kinerja dan kesungguhannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan mengatasnamakan kepentingan rakyat tapi sesungguhnya memperjuangkan kepentingan sendiri atau kelompok. Apalagi, saat ini ekonomi rakyat belum bebas dari kemiskinan. Maka menaikkan gaji dan tunjangan wakil rakyat adalah menyakiti hati rakyat," kritiknya.

Menurutnya, DPRD yang merupakan penyambung lidah rakyat harus berpikir menyampaikan aspirasi rakyat dan bisa menyejahterakaan rakyatnya. Bukan malah memperkaya diri sendiri. Wakil rakyat juga harus bisa menunjukkan kehormatannya di hadapan rakyatnya. Apalagi, terpilihnya mereka menjadai anggota dewan karena pilihan rakyat. Sehingga, tujuan utama mereka adalah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.

"Selama rakyat yang diwakilinya itu sendiri belum menjadi sejahtera, atau kinerja wakil rakyat itu sendiri tidak maksimal, maka tidaklah pantas jika sang wakil rakyat malah menaikkan gaji dan tunjangan. Itu sikap yang tidak terpuji," tegasnya. **(ara/win)**

Edisi : Minggu, 13 Agustus 2017
Hal : 19